

Akuntabilitas desa membangun implementasi kewenangan lokal dalam pelaksanaan kampung membangun menuju kampung mandiri pada kampung Muris Kecil, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua = Village development accountability implementation of local authority in the implementation of building village towards independent villages in kampung Muris Kecil, Jayapura Regency, Papua Province / Raimond Sato

Raimond Sato, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20484966&lokasi=lokal>

Abstrak

Abstrak

Paradigma desa membangun merupakan gagasan yang memposisikan desa mandiri dalam menggerakkan pembangunan dari bawah, dengan prakarsa lokal atau ide yang digagas melalui adanya interaksi masyarakat yang berskala lokal di kampung. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa maka setiap kegiatan pembangunan berskala lokal yang ditujukan di kampung merupakan bagian dari desa membangun atau desa menggerakkan pembangunan. Upaya pembangunan lokal di kampung Muris Kecil yang ditujukan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten nampak pada pemberian alokasi dana yang besar setiap tahunnya, namun dalam Indeks Desa Membangun 2015, kampung Muris Kecil masuk dalam kategori tertinggal atau kampung tertinggal. Menarik untuk dilihat bagaimana implementasi kewenangan lokal yang dimiliki kampung dalam mengelola pembangunan dikampung muris kecil menuju desa mandiri, melalui transparansi, akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang melalui alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam serta observasi langsung di kampung Muris Kecil. Dari hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kewenangan lokal dalam pelaksanaan pembangunan belum mampu diwujudkan sebagaimana mestinya dan penerapannya masih terhambat karena beberapa hal antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, akses masyarakat terhadap informasi untuk memahami informasi-informasi yang penting terkait pengelolaan pembangunan dikampung masih sangat kurang, lemahnya peranan institusi lokal yang ada dikampung untuk menunjang adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan lemahnya peran institusi lokal kemasyarakatan dalam mengelola isu politik lokal yang sangat kental dengan monopoli dan kesewenang-wenangan dari pemerintah kampung sebagai penyelenggara pembangunan dikampung, selain itu juga belum ada skala prioritas dan komitmen dalam menetapkan program, kemudian juga tantangan yang ada juga seperti kekuatan birokrasi politik lokal yang berpengaruh terhadap pengelolaan kewenangan di kampung dan seringkali menghadirkan praktek-praktek politik praktis dalam pelaksanaan program yang diasistensi oleh dinas atau organisasi perangkat daerah kabupaten sampai dengan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang dilakukan dikampung, dan yang terakhir adalah terbentuknya pengelompokan masyarakat sebagai bagian dari protes masyarakat dimana pemerintahan kampung tidak mengedepankan asas demokrasi juga buruknya tatakelola pemerintah kampung yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sehingga pembangunan menuju kemandirian kampung tidak dapat diwujudkan.

Issues of local

authority in the implementation of village development

Abstract

The village building paradigm is an idea that positions independent villages in moving development from below, with local initiatives or ideas initiated through local community interaction in the village. Authority based on origin rights and village-scale local authority then any local scale development activities aimed at villages are part of the building village or the village moves development. Local development efforts in the village of Muris Kecil addressed by the Central, Provincial and District governments appear in the provision of large funds every year, but in the 2015 Village Development Index, the village of Muris Kecil falls into the category of lagging or disadvantaged villages. It is interesting to see how the implementation of local authority possessed by the village in managing development in the village of small muris to independent villages, through transparency, accountability and involvement of the community in Musrenbang activities through the planning, implementation, and reporting of each development activity carried out in the village. This study used a qualitative approach and in-depth interview techniques and direct observation in the village of Muris Kecil. The results of the study show that the implementation of local authority in the implementation of development has not been able to be properly realized and its implementation is still hampered because several things include lack of competent human resources, public access to information to understand important information related to village development management is still very lacking the weak role of local institutions in the village to support community involvement in all development activities and the weak role of local institutions in managing local political issues that are very thick with monopoly and arbitrariness from the village government as organizers of development in the village. priorities and commitments in establishing programs, then also the challenges that exist as well as the strength of local political bureaucracy that influences management of authority in the village and often presents practice - Practical political practices in the implementation of programs that are supported by the district offices or organizations up to the process of making accountability reports on activities carried out in the village, and finally the formation of community groupings as part of community protests where village governments do not put forward the principles of democracy and poor governance village government based on accountability, transparency and participation so that development towards village independence cannot be realized.